

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan adalah hal yang vital untuk para pengguna laporan keuangan, praktisi, regulator, dan para peneliti di bidang akuntansi. Tingginya kualitas informasi akuntansi seperti pendapatan juga menjadi hal penting bagi pemerintah untuk mengakses pasar modal dan pasar hutang. Informasi mengenai pendapatan berfungsi untuk mendeskripsikan performa keuangan pemerintahan (Pangkan, 2021).

Kualitas laporan keuangan erat kaitannya dengan penyajian yang dilakukan oleh penyusun laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan tidak dapat ditelusuri bukti transaksinya dapat berakibat rendahnya kualitas laporan keuangan. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan akrual dari pimpinan instansi yang tidak terdapat bukti akrualnya seperti penyusutan aset, cadangan kerugian piutang, perubahan metode pencatatan persediaan yang juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Arfiansyah, 2022).

Kualitas laporan keuangan yang baik menunjukkan pimpinan organisasi memiliki itikad baik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Sebaliknya, kualitas laporan keuangan yang rendah dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Ulasan atas kualitas laporan keuangan khususnya pada level pemerintah daerah masih menjadi isu yang menarik untuk diulas, sehingga penelitian atas pengujian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu diinvestigasi lebih lanjut (Firmansyah, 2022).

Fenomena yang terjadi saat ini, Dilihat dari Lampost.co, Juru Bicara Pansus DPRD Kota Bandar Lampung, Ali Wardana, menyebutkan dua organisasi perangkat daerah

(OPD) dan RS A Dadi Tjokrodipo belum melunasi temuan BPK atas laporan keuangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2022. Rekapitulasi jumlah temuan yang disetorkan atau dikembalikan Rp5,503 miliar dari Rp12,247 miliar. Temuan tersebut terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Diskominfo, Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat dan Way Halim. OPD yang belum menyetorkan secara keseluruhan yaitu Disdikbud dengan temuan Rp1,819 miliar baru diselesaikan Rp10,536 juta atau 0,58 persen. Dinas PU dengan temuan Rp9,426 miliar, baru diselesaikan Rp4,509 miliar atau 47,77 persen, dan RS A Dadi Tjokrodipo temuan Rp33 juta, diselesaikan 16,500 juta atau 49,93 persen. Atas temuan tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung memberikan sejumlah rekomendasi agar Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, segera menetapkan pejabat penggunaan anggaran. Hal itu agar optimal dalam penggunaan anggarannya di program kegiatan.

Akuntabilitas merupakan dasar guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan wewenang tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan target. Entitas kebijakan publik dalam hal ini ialah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas sikap, perilaku, dan tindakanya terhadap masyarakat dalam melaksanakan kewajiban, fungsi dan wewenangnya. Akuntabilitas dijadikan landasan untuk melaporkan keuangan pemerintah. Akuntabilitas adalah tujuan akhir dari pelaporan keuangan pemerintah dan ada hubungan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan (Halim et al.,2012).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan informasi guna mengambil keputusan. Oleh karena itu, transparansi dijadikan landasan untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah (Arifin Tahir, 2011:165). Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus secara aktif memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang dikelolanya. Adanya

transparansi dari pemerintah dan disertai adanya undang-undang yang jelas dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.

Sistem akuntansi berbasis akrual bisa mencatat seluruh transaksi, aset beserta kewajiban pada saat pencatatan. Implementasi dari penerapan sistem ini memberikan peluang tinggi dalam memudahkan OPD untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih maksimal, jelas dan bertanggung jawab (Rachmat, 2022).

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Kurniawati, 2021) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pada penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Yang membedakan penelitian ini adalah karena ada penambahan variabel yaitu sistem akuntansi berbasis akrual berdasarkan penelitian (Rachmat, 2022) karena implementasi dari sistem berbasis akrual ini memberikan peluang tinggi dalam memudahkan OPD untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih maksimal, jelas dan bertanggung jawab dan studi kasus dilakukan pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada OPD Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung.
2. Subjek penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Objek Penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2 Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3 Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini mampu menambahkan penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Bandar Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN